

OPTIMALISASI OBJEK WISATA MUSEUM TUANKU IMAM BONJOL DAN AIR PANAS RIMBO PANTI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

Oleh:

REDO PRATAMA HARISTA

Email : redo_pratama16@yahoo.com

Pembimbing : FEBRI YULIANI

Jurusan Ilmu Administrasi Negara – Prodi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract:

The Optimization of Tuanku Imam Bonjol Museum and Rimbo Panti Hot Spring as Tourism Objects in Increasing Regional Income of Pasaman District. The purpose of this research was keen to investigate the way of optimizing Tuanku Imam Bonjol Museum and Rimbo Panti Hot Spring as tourism objects and the government strategies in optimizing the tourism objects in Pasaman District. The primary and secondary data data were collected through several techniques namely observation, interview, and library research. From the result of the study, it could be inferred that the primary touring destinations in Pasaman District were not fully optimized and the most of the employees found are positioned beyond their competencies.

Key Words: Optimization, Tourism Objects, Management, Regional Income (PAD)

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam Otonomi daerah dengan menyusun suatu perencanaan pembangunan yang terpadu dan komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan terpadu dan mempertimbangkan potensi serta peluang yang ada di daerah bersangkutan sehingga terwujud pembangunan yang multi sektor.

Era Otonomi daerah sebagai implikasi dari berlakunya UU No 32 tahun 2004, memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat

dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam pengembangan daerah sudah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Menurut **H.A.W. Widjaja (1998:18)** tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam raga pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, termasuk juga pembangunan di sektor pariwisata yang diharapkan nantinya dapat memberikan

kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi dan tuntutan saat ini, maka dibutuhkan kebijakan dan manajemen pemerintah daerah yang efektif, efisien dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warganya.

Misi pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat lokal melalui layanan prima, pemberdayaan, dan pembangunan yang bersifat partisipatif hanya dapat dijalankan dan dicapai jika pemerintah daerah memiliki kebijakan yang sistematis dan strategis, serta organisasi birokrasinya dikelola secara efektif, efisien, dan inovatif.

Pelaksanaan otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip Demokrasi, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta pertimbangan atas potensi dan diversifikasi daerah. Kabupaten Pasaman sebagai daerah Otonom juga diharapkan untuk melakukan pengaturan dan pemerintahan atas wilayahnya secara mandiri. Maka pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman berupaya untuk menggali potensi daerah yang ada di Kabupaten Pasaman.

Setelah Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, PAD Kabupaten Pasaman sudah tentu menurun. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) paling banyak berada di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan daerah yang memisahkan diri. Hal ini berakibat pada perekonomian Kabupaten Pasaman sebagai daerah induk berkurang.

Optimalisasi objek wisata sepertinya harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Pasaman bila ingin meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman itu sendiri mengingat gambaran secara geografis daerah Kabupaten Pasaman terdiri dari hutan dan perbukitan yang dimana hal tersebut sangat mendukung untuk dijadikan objek wisata alam maupun buatan.

Kabupaten Pasaman memiliki objek wisata yang cukup variatif sehingga dinilai mampu memenuhi segala keinginan wisatawan. Hal tersebut menjadikan objek wisata sebagai aset yang bernilai bagi Kabupaten Pasaman, Khususnya dalam perolehan PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah dari kunjungan wisatawan.

Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman, objek wisata yang potensial dan memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah hanya objek wisata museum tuanku Imam Bonjol dan objek wisata air panas Rimbo Panti. Hal ini disebabkan karena letaknya yang strategis, yaitu berada pada jalur lintas Sumatera sehingga ke dua objek wisata ini menjadi objek wisata andalan bagi Kabupaten Pasaman sehingga pemerintah Kabupaten Pasaman lebih memusatkan perhatian kepada kedua objek wisata tersebut dibandingkan objek wisata lainnya. Namun karena pengelolaannya masih belum optimal sehingga pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata masih tergolong rendah dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 :

Tabel 1.2

Kontribusi pajak terhadap PAD di Kabupaten Pasaman tahun 2012

No.	Jenis Pajak	Pendapatan
1	Retribusi	521.924.342

	pemakaian kekayaan daerah	
2	Pajak restoran	483.833.400
3	Pajak hotel	65.683.980
4	Pariwisata	18.531.000

Sumber : Dispenda Kabupaten
Pasaman

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa sektor pariwisata berada pada peringkat bawah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman sehingga membuktikan bahwa pengelolaan sektor pariwisata masih belum optimal, baik dari segi sarana dan prasarana maupun dalam segi promosinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui tingkat kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir pada objek wisata museum tuanku Imam Bonjol dan objek wisata air panas Rimbo Panti yang tidak konstan. Jumlah kunjungan wisatawan pada kedua objek dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata museum tuanku Imam Bonjol dan objek wisata air panas Rimbo Panti tahun 2008-2012

Objek wisata	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Museum tuanku Imam Bonjol	6.017	8.819	2.481	7.037	7.093
Objek wisata air panas Rimbo Panti	5.463	5.304	8.665	4.553	4.399
Total	11.480	14.123	11.146	11.590	11.492

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman

Pada tabel di atas dapat dilihat tingkat kunjungan pada kedua objek wisata mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi tentu karena adanya faktor-faktor tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah pengunjung yang signifikan pada tahun-tahun tertentu. Dalam meningkatkan penerimaan PAD di sektor pariwisata, tingkat kunjungan pada

satu objek wisata merupakan faktor yang sangat penting. Karena pada dasarnya jumlah PAD yang diterima secara tidak langsung bergantung pada tingkat kunjungan suatu objek wisata.

Berdasarkan data yang diperoleh, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (DISPORABUDPAR) telah menetapkan target perolehan PAD pada sektor pariwisata setiap tahunnya melalui RAPBD. Setiap 2 tahun sekali target PAD pada sektor pariwisata mengalami peningkatan yang tujuannya tentu saja meningkatkan pendapatan daerah pada sektor pariwisata. Namun dalam 5 tahun terakhir realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada sektor pariwisata cenderung tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Target dan realisasi PAD pada sektor pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Target dan realisasi PAD pada sektor pariwisata

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	2008	12.500.000	15.655.000	125,24 %
2	2009	12.500.000	15.584.000	124,67 %
3	2010	16.961.000	6.340.000	37,37 %
4	2011	16.961.000	10.856.000	64 %
5	2012	19.000.000	18.531.000	97,53 %

Sumber : Dispenda Kabupaten Pasaman

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat kontribusi yang bersumber dari sektor pariwisata terhadap PAD belum signifikan. Tiga tahun terakhir sektor pariwisata tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan. Muncul pertanyaan, mengapa hal demikian bisa terjadi? Asumsi yang muncul yaitu mungkin dikarenakan pengelolaan sektor pariwisata kurang optimal atau hal-hal yang bersifat non teknis yang melatarbelakangi hal tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan

belum maksimalnya pengelolaan sektor pariwisata di Pasaman, di antaranya adalah :

1. Kurangnya perawatan fasilitas pendukung di sekitar objek wisata. Infrastruktur pendukung di sekitar objek wisata yang ada di Pasaman seperti Museum Tuanku Imam Bonjol dan Objek Wisata air panas Rimbo Panti kurang memadai dan masih banyaknya fasilitas yang tidak terawat.
2. Manajemen yang bermasalah dalam pengelolaan objek wisata. Besarnya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pasaman sangat memungkinkan Kabupaten Pasaman dijadikan sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang mampu memenuhi segala kebutuhan wisatawan. Namun karena manajemen yang tidak baik mengakibatkan kurangnya wisatawan yang datang mengunjungi Kabupaten Pasaman yang secara tidak langsung berdampak kepada PAD Kabupaten Pasaman.

Indikasi di atas bila dibiarkan berlarut-larut tanpa dan solusi yang konkret dari pihak terkait tentu saja akan mempengaruhi PAD Kabupaten Pasaman secara perlahan, karena tingkat kunjungan wisatawan jelas mempengaruhi jumlah retribusi dan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Menurut **Rudy Aryanto (2007:2)** objek wisata yang telah diberdayakan mempunyai mempunyai nilai jual lebih dan jauh lebih efektif dalam mendatangkan pendapatan suatu daerah bila dibandingkan dengan objek wisata yang masih dikelola secara konvensional. Dari teori tersebut dapat diasumsikan bahwa dengan mengoptimalkan objek wisata, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Karena dalam prosesnya objek wisata merupakan komponen dalam sektor pariwisata yang merupakan produk sekaligus sasaran yang akan dijual kepada para wisatawan melalui usaha jasa pariwisata (transportasi) dan usaha sarana pariwisata (akomodasi) yang mengakomodir segala kebutuhan wisatawan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi

PAD berupa pajak sebagai usaha Perolehan jasa dari wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan objek wisata Museum Tuanku Imam Bonjol dan Air Panas Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman serta mengetahui strategi pemerintah dalam mengoptimalkan sektor pariwisata sehingga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dengan masalah ini.
- c. Sebagai rekomendasi bagi Pemda Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan perhatian kepada sektor wisata dalam menunjang PAD Kabupaten Pasaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu memaparkan permasalahan dalam pengoptimalisasian objek wisata Museum Tuanku Imam Bonjol dan Air Panas Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman. Dalam menentukan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam pengoptimalisasian objek wisata di Kabupaten Pasaman. Untuk melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan teknik kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggabungkan teori pariwisata James J. Spillane dan manajemen William R. Spriegel, dalam upaya mengoptimalkan objek wisata Museum Tuanku Imam Bonjol dan Air Panas Rimbo Panti, didapatkan beberapa hal yang harus dioptimalkan. beberapa hal tersebut di jelaskan sebagai berikut :

- (a) Perencanaan dalam mengoptimalkan objek wisata di Kabupaten Pasaman.

Dalam mengoptimalkan objek wisata di Kabupaten Pasaman diperlukan adanya perencanaan dalam pengelolaannya. Mengapa perlunya perencanaan? Kita sadar bahwa suatu kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan besar kemungkinan sulit untuk mencapai tujuan secara optimal. Hal ini berkaitan karena tidak ada *guide line* apa yang akan dilakukan, berapa jumlahnya, bagaimana melakukannya, dan lain sebagainya. Keadaan ini akan menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan tidak teratur, tidak efektif dan tidak efisien (*inefficiency*). **Handoko (1995)** mengemukakan dua alasan dasar perlunya perencanaan dilakukan. Pertama, berkaitan dengan "*protective benefit*" yang diperoleh dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dengan adanya perencanaan. Kedua, berkaitan dengan "*positif benefit*" yang diperoleh dalam bentuk peningkatan sukses pencapaian tujuan organisasi karena adanya perencanaan. Hal ini dipahami bahwa dengan adanya perencanaan, disamping persiapan input lebih baik, juga prosesnya juga baik, sehingga jelas lebih memungkinkan untuk menghasilkan output lebih baik pula. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya yang diperlukan dalam melakukan perencanaan terhadap pengelolaan objek wisata di Kabupaten

Pasaman adalah yang merencanakan perencanaan tersebut, maka DISPORABUPAR Kabupaten Pasaman merupakan Organisasi Pemerintah memiliki tanggung jawab melakukannya.

Untuk menjadikan sebuah objek wisata tersebut menjadi optimal, **James J. Spillane** menjelaskan lima unsur penting objek wisata dalam kegiatan operasionalnya. Pengelolaan unsur-unsur inilah yang harus direncanakan oleh DISPORABUDPAR Kabupaten Pasaman untuk mengoptimalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Atraksi

Merupakan pusat (*primary destination*) dari industri pariwisata yang sangat menarik perhatian wisatawan yang ingin mengunjunginya dan merupakan objek pokok dari perjalanan wisatawan tersebut. Atraksi juga dikenal dengan sebutan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang diartikan sebagai segala macam objek bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tarik wisata dan layak ditawarkan. "dijual" kepada pasar wisata, baik wisatawan domestik ataupun mancanegara.

Pada dasarnya fungsi sebuah objek wisata adalah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara psikologis sehingga wisatawan merasa puas dengan keberadaannya di objek wisata tersebut. Beranjak dari hal itu, untuk lebih mengoptimalkan atraksi, sebaiknya potensi objek wisata lebih dieksplorasi kearah yang positif dengan cara menciptakan atraksi sekunder lainnya yang tentunya dilakukan berdasarkan penelitian kebutuhan pasar wisata pada saat ini.

Kasi objek, daya tarik dan promosi wisata (1 April 2014) dalam wawancara

menjelaskan bahwa di Kabupaten Pasaman terdapat beragam objek wisata yang menarik, namun dikarenakan berbagai macam kendala maka objek wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Pasaman hanya ada 2, yaitu : Objek Wisata Alam Rimbo Panti dan Museum Tuanku Imam Bonjol. Namun disayangkan karena keterbatasan biaya, maka upaya pengembangan objek wisata tidak terlaksana.

Objek Wisata Alam Rimbo Panti merupakan objek wisata yang sangat penting dan besar artinya bagi Kabupaten Pasaman. Kawasan Wisata Alam ini merupakan sasaran dan tujuan bagi wisatawan mancanegara karena lokasinya yang terletak pada jalur lintas Sumatera. Objek wisata memiliki berbagai jenis tumbuhan tropis, berupa tumbuhan rawa dataran rendah sampai dataran tinggi dan jenis fauna seperti : harimau sumatera dan tapir yang keberadaannya hampir punah, serta hewan-hewan lainnya. Dan tidak kalah pula dengan keberadaan sumber air panas yang suhunya mencapai 150⁰C serta wisatawan juga dapat menikmati pemandian air panas di kolam pemandaian.

Meskipun memiliki potensi objek wisata yang luar biasa, namun jika objek wisata tidak dikelola dengan baik maka objek wisata tersebut tidak akan mampu bersaing di pasar wisata.

Menurut kasi objek, daya tarik dan promosi wisata, Joni Sutrisno menjelaskan DISPORABUDPAR sangat kesulitan dalam hal pengembangan objek wisata dikarenakan dua hal. Pertama, karena anggaran yang diberikan kepada kami sangat minim hanya sekitar 40 juta pertahun. Itupun dibagi untuk dua objek wisata yang berarti masing-masing objek wisata mendapatkan jatah 20 juta pertahun. Biaya untuk pemeliharaan saja tidak cukup apalagi untuk pengembangan. Tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga maka objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman akan seperti itu-itu saja. Yang

kedua, adalah khusus untuk kawasan wisata alam rimbo panti, karena kawasan ini merupakan daerah hutan lindung yang berada dalam pengawasan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang melarang menambah areal, membakar sampah maupun membuat tempat hiburan, sehingga untuk pengembangan wisata alam rimbo panti menjadi sulit.

Minimnya anggaran menjadi faktor utama penghambat dalam pengembangan objek wisata. Padahal Bidang Kepariwisata DISPORABUDPAR telah merumuskan suatu *master plan* sebagai upaya pengembangan objek wisata yang menjadi unggulan Kabupaten Pasaman itu.

2. Fasilitas

Fasilitas merupakan unsur penting yang harus ada dalam sebuah objek wisata. **James J. Spillane (1994:70)** menjelaskan fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung operasional objek wisata untuk mengakomodasi segala kebutuhan wisatawan, tidak secara langsung mendorong pertumbuhan, tetapi berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang, dan mengelompokkan fasilitas menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Fasilitas utama

Fasilitas utama merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dan dirasakan sangat perlu selama pengunjung di suatu kawasan objek wisata. Sarana utama pada objek wisata adalah areal yang dijadikan objek wisata itu sendiri.

Areal utama pada museum tuanku imam bonjol yang diproyeksikan sebagai sebuah gedung yang berisikan benda-benda bersejarah kebudayaan Minangkabau dan peralatan yang digunakan oleh pahlawan Tuanku Imam Bonjol pada masa penjajahan. Museum ini terletak tepat pada garis khatulistiwa,

dimana setiap bulan maret dan september diperingati kejadian alam berupa titik kulminasi, yaitu ketika bumi mengelilingi matahari sampai pada titik orbitnya yang mengakibatkan bayangan bumi berdempet dengan matahari sehingga semua benda-benda yang berada tepat pada garis 0⁰ LU dan LS tersebut tidak memiliki bayangan. Meski memiliki event yang sangat jarang ada dan hanya dapat terjadi di daerah yang dilalui daerah khatulistiwa, semuanya tidak akan menarik minat pengunjung jika objek wisata tersebut tidak didukung fasilitas yang memadai.

Kondisi infrastruktur pada areal utama sangat tidak terawat. Menurut pengelola semenjak tahun didirikannya objek wisata, belum ada upaya revitalisasi oleh pihak terkait dikarenakan keterbatasan dana.

b. Fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung merupakan sarana yang pada proposisinya sebagai pelengkap fasilitas utama sehingga wisatawan akan merasa lebih betah dan kerasan untuk di daerah kunjungan wisata. Sarana pendukung pada objek wisata seperti : hiburan, restoran, toko souvenir.

a) Hiburan

Hiburan merupakan ‘magnet’ efektif yang memotivasi pengunjung untuk datang ke suatu kawasan objek wisata. Hal ini juga berlaku pada museum Tuanku Imam Bonjol dan wisata alam Rimbo Panti. Namun, berbeda pada kenyataannya dimana pada kedua objek wisata hanya ditemukan area bermain anak-anak yang sudah tidak layak pakai.

b) Restoran

Di kedua objek wisata tidak satupun tempat yang menjual makanan dan minuman yang memenuhi kriteria standarisasi sebuah restoran. Untuk memperoleh ‘makanan berat’ pengunjung harus keluar areal objek wisata.

c) Toko Souvenir

Souvenir merupakan kenang-kenangan yang bersifat *itangible* yang akan meningkatkan pengunjung kepada tempat yang pernah dikunjunginya. Memiliki souvenir suatu daerah kunjungan wisata menjadikan suatu kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Di objek wisata museum Tuanku Imam Bonjol dan wisata alam Rimbo Panti tidak terdapat toko souvenir yang disediakan oleh pihak pengelola maupun swadaya masyarakat sekitar. Dan tidak terdapat satupun pernak-pernik yang diperjualbelikan sebagai kenang-kenangan keberadaan seseorang di kedua objek wisata yang di unggulkan Kabupaten Pasaman tersebut.

Tersedianya toko souvenir disekitar objek wisata, bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan wisatawan akan tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata dengan mengambil bagian pada pengadaan toko souvenir tersebut.

c. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang pada dasarnya merupakan sarana yang bersifat melengkapi fasilitas utama dan pelengkap sehingga para wisatawan agar lebih terpenuhi apapun kebutuhan selama dalam pelawatannya. Seperti : jasa kesehatan, musholla, taman, pos keamanan, pusat informasi, areal parkir.

a) Jasa kesehatan

Segala bentuk kecelakaan dapat saja terjadi di kawasan objek wisata. Bila terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan maka solusi pertama kali yang dilakukan adalah membawa korban kecelakaan ke tempat pertolongan pertama. Dalam hal ini pihak pengelola harus menyediakan jasa kesehatan sebagai tindakan preventif sebelum dirujuk kerumah sakit terdekat bila kondisi korban tidak memungkinkan lagi untuk diantisipasi.

Mengingat salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Pasaman adalah objek wisata alam Rimbo Panti dimana pada lokasi terdapat sumber air panas yang suhunya mencapai 150⁰ dan merupakan hutan lindung bagi fauna seperti harimau sumatera, beruang dan lain-lain yang sejatinya adalah hewan buas tentunya sangat membutuhkan penanganan medis secara cepat. Namun, dilokasi objek wisata tidak ditemukan adanya pos kesehatan dan sejenisnya.

b) Musholla

Sebagai sarana aktifitas ibadah, pengelola memang perlu membangun tempat ibadah (musholla) disekitar objek wisata. Meski musholla telah dibangun pada kedua objek wisata ini, namun kurangnya minat pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata menyebabkan fasilitas beribadah ini tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Pasalnya pada objek wisata alam Rimbo Panti, musholla yang berada ± 10 meter dari objek wisata sangat jelas terlihat jarang aktifitas ibadah yang ditandai dengan pintu masuk musholla yang tertutup. Musholla ini hanya jadi tempat persinggahan oleh pengendara yang ingin buang air.

c) Taman

Objek wisata museum Tuanku Imam Bonjol dan Rimbo Panti memiliki sebuah taman, namun tidak terkelola dengan baik. Pada objek wisata museum Tuanku Imam Bonjol, taman yang cukup luas terletak tepat didepan dimana museum berdiri. Pada taman terdapat beberapa pondok berukuran kecil dan pohon tempat pengunjung berteduh serta area bermain anak-anak. Sedikitnya jumlah pohon dan pondok yang ada menyebabkan tidak semua pengunjung dapat menikmati dan melepaskan lelah di taman tersebut. hal yang sama juga terjadi pada objek wisata alam Rimbo Panti yang terkesan asal-asalan. Didepan kolam pemandian air panas terdapat taman yang berukuran

sangat kecil, dimana pada taman tersebut terdapat 3 pondok yang tidak terawat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kondisi fasilitas yang terdapat pada objek wisata sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan perhatian dari pihak terkait.

kasi usaha jasa, pengembangan sarana wisata, Mawarti, BA menjelaskan fasilitas yang terdapat pada objek wisata yang ada masih sangat jauh dari standar. Jangankan pengadaan fasilitas penunjang, untuk fasilitas utama yang ada saja sudah banyak yang mengalami kerusakan sehingga kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung. Hal ini lagi-lagi terjadi akibat minimnya biaya dalam pengembangan objek wisata yang ada.

Pernyataan diatas didukung juga oleh pernyataan salah seorang petugas yang berada di objek wisata alam Rimbo Panti, fasilitas yang adanya sudah sangat tidak layak serta butuh perbaikan. Sejak saya bekerja di sini, belum ada upaya perbaikan dari pihak terkait. Jika mengharapkan anggaran dari pemerintah, objek wisata ini akan tetap seperti ini saja. Yang kita butuhkan saat ini adalah campur tangan dari pihak ke-tiga.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menarik minat wisatawan, objek wisata di Kabupaten Pasaman harus memiliki kondisi fasilitas yang optimal, yaitu suatu posisi dimana keberadaan fasilitas mampu mengakomodir segala keinginan pengunjung dan membuat pengunjung merasa nyaman selama berada di suatu objek wisata. untuk menciptakan kondisi optimal tersebut, pengelola objek wisata Kabupaten Pasaman harus melakukan pembenahan diri melalui revitalisasi dan pembangunan semua sarana dan prasarana yang menjadi elemen dasar untuk memenuhi kebutuhan pengunjung.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, sarana dan prasarana tidak terlepas dari peranan pihak pengelola dan masyarakat sebagai *stakeholder*. Dalam artian pihak pengelola memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang bergantung pada produktivitas objek wisata melalui perizinan pemakaian fasilitas untuk dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Peranan masyarakat nantinya dapat dirasakan melalui usaha/jasa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama berada di suatu objek wisata. kontribusi lainnya adalah retribusi yang mereka berikan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa fasilitas yang berlanjut pada Peningkatan PAD.

3. Infrastruktur

Pemerintah juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penyediaan infrastruktur pariwisata, karena masalah ini juga memiliki keterkaitan dengan wilayah/daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana pariwisata perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur.

James J. Spillane (1994:70) membagi infrastruktur ke dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Fasilitas air bersih
- b. Tenaga listrik
- c. Komunikasi
- d. Sanitasi

Infrastruktur yang optimal harus dibangun, disusun dan direncanakan secara profesional agar dalam operasionalisasinya dapat membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan antara infrastruktur dan fasilitas. Dalam beberapa fungsi umum tujuan pengadaan infrastruktur adalah sebagai suply (listrik, telepon dan air) untuk operasionalisasi fasilitas. Dalam proses pensuplyan instalasi/jaringan air sebaiknya melalui jaringan bawah tanah

sehingga tidak mengganggu estetika maupun aktivitas pada objek wisata.

Bila merujuk pada kondisi infrastruktur objek wisata Kabupaten Pasaman, maka saat ini perlu direncanakan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh agar operasionalisasi seluruh fasilitas dapat dijalankan. Karena secara fundamental hierarki kepuasan dan kenyamanan pengunjung dimulai dari kesiapan infrastruktur, fasilitas-fasilitas dan sumber daya manusianya.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungkan tempat tinggal wisatawan dengan objek dan daya tarik wisata yang dituju, maupun yang menghubungkan objek wisata di daerah tujuan wisata. Komponen ini sangat penting bagi pengembangan objek wisata karena akan menjadi salah satu penentu besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan dalam berwisata. Aksesibilitas ini mencakup infrastruktur jalan dan sarana transportasi. Semakin baik aksesibilitas yang tersedia dan dapat digunakan oleh wisatawan, akan semakin meningkatkan daya tawar suatu objek/daya tarik wisata.

a. Sarana

Sarana transportasi merupakan hal penting dalam proses pencapaian seorang pengunjung menuju satu kawasan objek wisata. Karena kedua objek wisata berada pada jalur lintas Sumatera maka pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi umum untuk mencapai objek wisata.

b. Prasarana

Kondisi jalan menuju objek wisata yang berjarak masing-masing lebih kurang 20 km (museum Tuanku Imam Bonjol) dan 30 km (objek wisata Alam Rimbo Panti) dari ibu kota Kabupaten Pasaman yaitu Lubuk Sikaping ini sampai saat ini

berkondisi baik dan layak. Perbaikan jalan ini dikarenakan pada tahun 2013 Kabupaten Pasaman menjadi salah satu rute yang dilalui dalam *event* Internasional tahunan yang diadakan oleh Sumatera Barat yaitu *Tour De Singakarak*, dan tahun ini Kabupaten Pasaman kembali mendapat kesempatan tersebut. Sehingga perbaikan prasarana jalan kembali dilaksanakan. Namun pemerintah perlu memperhatikan kualitas jalan secara rutin, perbaikan tidak hanya dilaksanakan ketika *event* besar akan berlangsung saja.

5. Hospitality

Keramah-tamahan dalam menyambut pengunjung merupakan salah satu cara membangun *image* positif satu kawasan wisata dan dapat menjadi modal dasar untuk mengajak pengunjung kembali ke objek wisata tersebut. Namun tidak halnya dengan museum Tuanku Imam Bonjol yang saat hari-hari biasa, petugas tidak berada pada objek wisata dan penulis mendapatkan bahwa pintu masuk museum dalam keadaan terkunci. Hal ini tentu menyebabkan ketidaknyamanan pengunjung yang berminat untuk berkunjung ke lokasi objek wisata.

Pengembangan objek wisata dapat dilaksanakan dengan dana yang terbatas, tetapi untuk hal tertentu, misalnya pembangunan sarana dan prasarana pendukungnya, diperlukan modal yang tidak sedikit. Di sinilah dunia industri yang pada umumnya memiliki banyak modal, dapat memainkan perannya dalam menanamkan investasi guna membiayai berbagai usaha pengembangan objek wisata. Pemerintah, industri dan masyarakat setempat harus bersinergi dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung upaya pengembangan wisata. Sinergi ini diperlukan karena mereka mempunyai kemampuan saling mendukung. Masing-masing pihak dapat melaksanakan perannya dengan maksimal tanpa harus merasa ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Dengan begitu

pengembangan infrastruktur pasti akan lebih cepat direalisasikan.

(b) Mengoptimalkan organisasi pengelola objek wisata

Pengorganisasian yang optimal merupakan satu integritas dari hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Secara garis besar staffing dan koordinasi merupakan poin penting dalam pembentukan kinerja pekerja.

1. Staffing

Banyak terjadi kekacauan di dalam tubuh DISPORABUDPAR terutama pada bidang kepariwisataan. Dimulai dari penempatan dan penerimaan tenaga kerja tidak berdasarkan kompetensi dan minimnya jumlah pegawai sehingga tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai.

Upaya yang harus dilakukan DISPORABUDPAR adalah melaksanakan *reshuffle* dan *recruitment* SDM yang ahli dan sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga terlaksananya asas pengisian jabatan yaitu *the right man on the right place and the right man in the right job* (penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat). Asas ini perlu diterapkan untuk menghindari terjadinya *missmanagement* dalam kepegawaian dan hendaknya berpedoman pada “apa” dan “siapa”. Dimana “apa” adalah uraian tugas-tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan pada jabatan tersebut (*job description*). Sedangkan “siapa” adalah syarat-syarat orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan pada jabatannya (*job specification*).

Metode yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan kinerja pegawai setelah diadakannya *reshuffle* maupun *recruitment* adalah dengan diadakannya pelatihan dan pengembangan (*Training and Development*). Baik pegawai lama

maupun pegawai baru sebelum menduduki jabatan yang ditawarkan kepadanya haruslah diberikan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan tersebut selain dapat dilakukan di dalam organisasi itu sendiri, juga dapat dikirim ke organisasi lain. Ada beberapa cara pelatihan pengembangan tersebut, antara lain : rotasi pekerjaan, dimana pegawai baru tersebut melakukan berbagai kegiatan; magang, dimana pegawai baru melakukan pekerjaan dibimbing oleh orang telah ahli dalam bidang pekerjaan tersebut; tugas belajar, dan lain sebagainya.

Bagi pegawai lama, upaya untuk tetap memelihara produktivitas, efektivitas dan efisiensi perlu dilakukan program-program pembinaan. Secara garis besar program pengembangan tenaga kerja dapat dibagi dua, yaitu *on the job* dan *off the job*. Metoda *on the job* bisa berupa kegiatan-kegiatan, seperti : (1) *coaching* yaitu program berupa bimbingan yang diberikan atasan kepada bawahannya mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan; (2) *planned progression*, yaitu program berupa pemindahan tenaga kerja ke bagian-bagian lain melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda-beda; (3) *job rotation*, yaitu program pemindahan tenaga kerja ke bagian-bagian yang berbeda-beda dan tugas yang berbeda-beda agar tenaga kerja lebih dinamis dan tidak monoton; (4) *temporary Task*, yaitu berupa pemberian tugas pada suatu kegiatan atau jabatan tertentu untuk periode tertentu; (5) program penilaian prestasi atau *performance appraisal*. Adapun metode *off the job* yang dapat dilakukan diantaranya adalah : (1) *executive development programme*, yaitu berupa program pengiriman manajer atau tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam berbagai program-program khusus diluar organisasi yang terkait analisis kasus, simulasi, maupun pembelajaran lainnya; (2) *laboratory Training*, yaitu berupa program yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk mengikuti program-program

berupa simulasi, dan lain-lain; (3) *organizational development*, yaitu program yang ditujukan kepada tenaga kerja dengan mengajak mereka untuk berfikir mengenai bagaimana cara memajukan organisasi mereka.

Dengan dilaksanakannya reshuffle, recruitment serta Training dan Development pada DISPORABUDPAR diharapkan dapat memperbaiki missmanagement yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih tepat sasaran.

2. Koordinasi

Koordinasi juga harus dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan ojek wisata melalui instrumen partisipasi masyarakat. Beberapa instrumen partisipasi yang dapat digunakan dalam koordinasi adalah komunikasi, konsultasi dan ko-produksi. Namun demikian, ketiga bentuk partisipasi tersebut merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dikategorikan dengan pola *top-down*. Untuk itu, bentuk partisipasi masyarakat yang otonom berdasarkan pola *bottom-up* menjadi pelengkap instrumen koordinasi melalui partisipasi.

Bentuk koordinasi diatas disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism* disingkat CBT). Konsep ini menunjuk pada pola pengembangan pariwisata yang didasarkan pada sumberdaya dan kemampuan masyarakat. CBT memberikan peran-serta masyarakat di dalam pembangunan pariwisata, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, implementasi, pengelolaan, sampai pada pemanfaatan dan distribusi hasil. Pola CBT memberikan peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya sosial, kultural dan ekonomi lokal oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat. CBT umumnya berskala kecil dan menengah, beragam, pekat dengan keunikan lokal. Meskipun demikian, posisi CBT sangat strategis untuk menggalang

kerjasama antar-komunitas di tingkat, nasional, regional dan internasional.

Selain memperbaiki koordinasi antar pegawai dalam badan DISPORABUDPAR khususnya bidang kepariwisataan, DISPORABUDPAR juga harus memperbaiki koordinasi dengan seluruh *stakeholder* bidang pariwisata. Dengan adanya koordinasi antar pihak terkait, selain mempermudah pembagian kerja juga memberikan kemudahan dalam urusan penganggaran pengembangan objek wisata dikarenakan terlibatnya seluruh *stakeholder* sehingga urusan penganggaran tidak hanya merupakan tanggungan pemerintah saja.

(c) Mengoptimalkan pengendalian pada pengelola objek wisata

1. Pengawasan

Pada dasarnya tujuan utama objek wisata di Kabupaten Pasaman adalah untuk mengakomodasi sebanyak-banyaknya pengunjung sehingga dapat membantu meningkatkan PAD Kabupaten Pasaman. Secara riil tujuan tersebut belum tercapai karena banyaknya faktor penghalang dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu informan, yang bertindak sebagai pengawas pada Bidang Kepariwisata adalah Kepala Dinas DISPORABUDPAR dan yang bertindak sebagai pengawas di lapangan adalah Kepala Seksi Bidang Kepariwisata. Namun, kurangnya pengawasan merupakan salah satu faktor penghalang dibidang organisasi. Pada saat ini kesadaran petugas untuk bekerja maksimal merupakan hal yang langka. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak terawatnya sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata museum Tuanku Imam Bonjol dan kawasan wisata alam Rimbo Panti. Padahal sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang no. 10

Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 poin d, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban : mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

2. Evaluasi

DISPORABUDPAR sebagai pihak manajemen utama hanya melakukan evaluasi sebatas mengetahui jumlah pemasukan setiap bulan.

kasi usaha jasa, pengembangan sarana wisata, Mawarti, BA menjelaskan untuk melakukan evaluasi secara rutin memang belum pernah dilakukan. Biasanya dilakukan sharing antara Kadis dengan kami ketika Kadis berkunjung diwaktu senggang.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin sehingga kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya terulang kembali dan semakin lalainya pegawai dalam melakukan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan keadaan objek wisata yang berada pada manajemen DISPORABUDPAR.

SIMPULAN

Pengoptimalan objek wisata di Kabupaten Pasaman masih dalam kategori belum optimal, hal ini dapat dilihat dari :

1. Upaya pengoptimalisasian objek wisata di Kabupaten Pasaman yang dilakukan oleh DISPORABUDPAR masih belum optimal sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi PAD. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke objek wisata yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman masih belum menganggap penting bidang pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah

- anggaran yang disediakan untuk pengelolaan objek wisata, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan objek wisata.
3. Belum adanya kerjasama dengan pihak ke-tiga, yaitu investor yang mampu menopang anggaran segala upaya pengembangan objek wisata yang ada.
 4. Banyaknya Pegawai yang tidak sesuai dengan kompeten serta minimnya pegawai yang berkompoten pada bidangnya. Kurangnya pengetahuan mengenai pariwisata dan aspek lain yang terkait dari pengembang/ pengelolanya ini menjadikan mereka tidak mampu untuk menyusun rencana pariwisata secara baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi, 2005, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Basry, Yusuf, 2008, *Optimalisasi Pengelolaan Objek Wisata Danau Buatan Dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pada Sektor Pariwisata Di Kota Pekanbaru*, Pekanbaru.
- Damarjati, 2001, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darsoprajitno, Suwarno, 2002, *Ekologi Pariwisata*, Angkasa Offset, Jakarta.
- Darwis, Yulianda, Eni dan Bathara, Lamun, 2011, *Dasar-dasar Manajemen*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru
- Fajarwati, Suci, 2010, *Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanah Datar*, Pekanbaru.
- Games, Faestino Cardoso, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hasan, Hamid, 2008, *Evaluasi Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ismayanti, 2011, *Pengantar Pariwisata*, Grasindo, Jakarta.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G., 2005, *Sosiologi pariwisata*, Penerbit Andi, Denpasar.
- Ruky, Ahmad, 2002, *Sistem Manajemen Kinerja*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusdianto, 2008, *Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir*, Pekanbaru
- Siagian, Sondang P., 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J, 2005, *Manajemen dan Evaluasi Kerja*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Soekadijo, R.G., 2000, *Anatomi Pariwisata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah, Kurniawan, 2008, *Pengantar Manajemen*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Umar, Husein, 2004, *Riset Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wardiyanto dan Baiquini, DR. M., 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. CV. Lubuk Agung, Bandung.
- Widhyantoro, Rudhyatin, 2006, *Pariwisata : Sebuah Pengantar*, Gramedia, Jakarta.
- Yoeti, Oka. A., 1994, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.